

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Aurelius Silvester Baptista

NPP 31.0649

*Asdaf Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: aurelius.silvester.ixg14@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Suraji, S.Sos., M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Digital Population Identity (IKD), which is one of the programs launched by the Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs, has been implemented since mid-2022. However, almost all regions still have not met the targets set, including Samarinda City. **Purpose:** This study aims to describe the activation strategy of Digital Population Identity in Samarinda City, obstacles in the implementation of IKD activation, and efforts made by the Population and Civil Registration Office of Samarinda City in overcoming obstacles. **Method:** This research uses Qualitative research using descriptive methods. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. **Result:** This research shows that the Strategy of the Population and Civil Registration Office in Increasing the Activation of Digital Population Identity has been implemented quite well but not maximized. **Conclusion:** This is because there are still quite a lot of evaluations that can be done in the future. The obstacles in activating IKD are frequent disruptions to the central network that hinder the IKD activation process, low public interest in IKD, lack of public understanding of IKD and user institutions that have not accepted IKD as a public service transaction system. Therefore, the efforts made by the Population and Civil Registration Office of Samarinda City are to increase socialization and promotion activities to the community, create an IKD Activation Team, open an IKD activation stand, make special provisions for the community and place Disdukcapil representatives in every sub-district in Samarinda City.

Keywords: Activation, IKD, Strategy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merupakan salah satu Program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang sudah dijalankan sejak pertengahan tahun 2022. Namun hampir secara keseluruhan daerah masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan termasuk Kota Samarinda. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Samarinda, kendala dalam pelaksanaan aktivasi IKD, dan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam mengatasi kendala. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum maksimal. **Kesimpulan:** Hal tersebut dikarenakan masih terdapat cukup banyak evaluasi yang dapat dilakukan kedepannya. Kendala dalam melakukan aktivasi IKD yaitu sering terjadinya gangguan pada jaringan pusat yang menghambat

proses aktivasi IKD, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap IKD, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap IKD dan lembaga pengguna yang belum menerima IKD sebagai sistem transaksi pelayanan publik. Maka dari itu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda adalah dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, membuat Tim Aktivasi IKD, membuka stand aktivasi IKD, membuat ketentuan khusus kepada masyarakat dan menempatkan perwakilan Disdukcapil di setiap kecamatan yang ada di Kota Samarinda.

Kata Kunci: Aktivasi, IKD, Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah menerapkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Implementasi Identitas Kependudukan Digital jika berhasil dilaksanakan maka sangat membantu semua pihak, pemerintah dapat menghemat anggaran karena mengurangi pengadaan blangko KTP elektronik, masyarakat dimudahkan karena tidak perlu fisik KTP elektronik dalam proses pelayanan. Kemudahan administrasi baik dalam dunia perbankan, wirausaha, layanan kesehatan, pelayanan perpajakan, pelayanan pendidikan, layanan asuransi kesehatan. Pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, efisien, data terintegrasi dengan data kependudukan dan terlindungi keamanan data (Permadi & Rokhman, 2023).

Inovasi Identitas Kependudukan Digital memungkinkan suatu bukti identitas yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan layanan publik, IKD juga dapat mempercepat proses verifikasi identitas, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, mencegah kehilangan atau pencurian identitas, karena data tersimpan secara elektronik dan dilindungi dengan fitur keamanan yang canggih. Dengan adanya IKD Masyarakat dapat memiliki akses yang mudah ke layanan publik tanpa harus membawa fisik KTP dan dapat mengurangi birokrasi dan akses yang dibutuhkan dalam proses administrasi kependudukan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kota Samarinda sudah mulai berjalan sejak pertengahan tahun 2022 dengan dasar masalah masih terjadinya kekurangan blangko e-KTP dan masih adanya penyalahgunaan dan pemalsuan e-KTP yang terjadi di Kota Samarinda. Dilansir dari kaltimfaktual.co jatah blangko dari pusat untuk Disdukcapil Kota Samarinda terlalu sedikit, sehingga sering mengalami kekurangan dan berujung pada penundaan pembuatan e-KTP. Masalah lain yang terdapat di Kota Samarinda adalah masalah penyalahgunaan dan pemalsuan data e-KTP, salah satu nya yaitu kasus penyalahgunaan kredit BRI (kredit topengan) yang data dirinya diperoleh pelaku dari media sosial atau internet seperti foto KTP elektronik atau kartu keluarga dilansir dari kaltimpost.jawapos.com.

Disdukcapil Kota Samarinda memperhatikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai dokumen yang sangat rawan dan sering dilakukan pemalsuan dan penyalahgunaan. Banyak masyarakat yang tertipu terkait KTP elektronik yang dipalsukan baik pemalsuan data maupun pemalsuan menggunakan data orang lain. Banyaknya kasus terjadi berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi seperti jual beli data pribadi, bocornya data rekening nasabah bank, maraknya aksi penipuan menggunakan data pribadi orang lain, peretasan akun pribadi melalui jaringan internet (Sinaga & Putri, 2020). Disdukcapil Kota Samarinda memandang KTP elektronik sebagai dokumen yang sangat penting hal ini terlihat dalam tabel di bawah yang mempresentasikan capaian perekaman KTP elektronik Disdukcapil Kota Samarinda:

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Bidang Pencatatan Sipil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
Terwujudnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara optimal	Persentase Perekaman KTP Elektronik tahun 2022	99,30%	96,81%

Sumber : diperoleh peneliti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Tahun 2023.

Melihat data pada tabel 1.1 tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memenuhi target kinerja yang ditentukan pada Tahun 2022 namun sudah mendekati dengan menunjukkan realisasi kinerja sebesar 96,81 %, menurut keterangan di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disdukcapil Kota Samarinda ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam perekaman KTP di Kota Samarinda yaitu masih kurangnya fasilitas peralatan alat perekaman KTP di 10 Kecamatan Kota Samarinda dikarenakan ada beberapa alat yang sudah rusak sehingga proses cetak KTP mengalami hambatan, kurangnya fasilitas mobil layanan jemput bola untuk layanan perekaman KTP di sekolah-sekolah, dan terkendala keterbatasan blangko KTP yang harus diambil ke Ditjen Adminduk dimana stok yang mereka berikan tidak bisa memenuhi keterbatasan KTP.

Dalam menghadapi permasalahan di atas, maka diperlukan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan serta inovasi terhadap masyarakat agar dapat menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan aman. Berangkat dari hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda menjalankan Program yang diberi nama Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merupakan salah satu Program yang dicanangkan oleh Dirjen DUKCAPIL Kementerian Dalam Negeri yang sudah dijalankan sejak pertengahan tahun 2022.

Aktivasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kota Samarinda masih belum memenuhi target. Sejak peluncurannya, baru 11 ribu masyarakat yang mengaktifkannya. Secara persentase, baru mencapai 2% dari jumlah penduduk Samarinda. Total keseluruhan masyarakat Samarinda sendiri, mencapai 859 ribu. Dengan wajib KTP berjumlah 610 ribu orang. Mengacu pada hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda tengah menggencarkan strategi sosialisasi Identitas Kependudukan Digital. Selain itu Disdukcapil Kota Samarinda juga melakukan strategi untuk menjemput bola dalam melakukan percepatan aktivasi, dengan mendatangi beberapa kantor dinas, ruang publik, sekolah dan universitas yang ada di Kota Samarinda.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan konteks Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian pertama yaitu (Widiyarta & Humaidah, 2023) dengan judul Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. Penelitian tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendorong digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya dibawah naungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu program Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah dilaksanakan sesuai dengan arahan, namun masih ada masalah yang dihadapi seperti smartphone belum support, tidak mempunyai smartphone, antusias kurang, dan perangkat yang masih lemot. Penelitian kedua yaitu (Permadi & Rokhman, 2023) dengan judul the Implementasi Identitas Kependudukan Digital

Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. Penelitian tersebut untuk mengetahui sejauhmana penerapan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Hasil dari penelitian tersebut Perlunya sosialisasi yang terus menerus tentang tata cara aktivasi dan manfaat aplikasi Identitas kependudukan Digital sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Penelitian ketiga yaitu (Alfarizi, 2023) dengan judul Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. Fokus penelitian ini yaitu Kartu Tanda Penduduk Digital, dengan hasil penelitian Perlunya penguatan infrastruktur, jemput bola transformasi dan sosialisasi KTP Digital menjadi tiga solusi utama mendorong masyarakat yakin dan siap bertransformasi dengan KTP Digital. Penelitian Keempat yaitu (Bella & Widodo, 2024) dengan judul Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. Hasil penelitian tersebut adalah di Kecamatan Tambaksari proses implementasi IKD sudah cukup baik dan proses implementasi sudah berjalan dan dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan publik yang ada. Penelitian Kelima yaitu (Firmansyah & Anisykurlillah, 2023) dengan judul Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. Hasil penelitian tersebut adalah pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kandangan termasuk dalam kategori efektif namun belum sepenuhnya maksimal. Penelitian Keenam yaitu (Yulanda & Frinaldi, 2023) dengan judul Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi program identitas kependudukan digital merupakan solusi atas beberapa masalah dalam pengelolaan dokumen kependudukan, seperti kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen, yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan. Penelitian Ketujuh yaitu (Safitri, 2023) dengan judul Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Tujuan dari penelitian ini adalah buat mengetahui Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hasil penelitian memberikan bahwa partisipasi warga pada penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terwujud atas manfaat yang dirasakan warga mencakup adanya kemudahan, bisa berhemat waktu, tidak harus datang ke kantor buat melakukan registrasi sebab dapat dilakukan dimana saja. Penelitian Kedelapan yaitu (Anryana et al., 2024) dengan judul Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini membahas tentang Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan dampak positif bagi pelayanan kependudukan dalam cara melayani dan berinteraksi dengan masyarakat sehingga sangat membantu masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan. Penelitian Kesembilan yaitu (Nurdiana & Ayumi, 2024) dengan judul Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. Penelitian ini membahas implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang dalam konteks E-Government. Hasil penelitian tersebut adalah implementasi IKD menghadapi beberapa kendala, namun upaya komunikasi dan disposisi yang baik menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan keberhasilan program. Penelitian Kesepuluh yaitu (Aprilia & Wahyudi, 2023) dengan judul Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor –faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan implementasi kebijakan pada program IKD di balai rw Kelurahan Kalirungkut sudah baik dan jelas arahnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana pada penelitian yang dilakukan penulis mengandung *novelty* atau kebaruan. Dimana pada penelitian sebelumnya teori yang digunakan umumnya menggunakan teori implementasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori Strategi dengan empat dimensi yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Selain itu penelitian ini juga dilaksanakan sekaligus untuk mengetahui kendala dan upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Samarinda dalam mengatasi kendala tersebut.

II. METODE

penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang memudahkan dalam mengeksplorasi serta mendeskripsikan untuk memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedang terjadi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan induktif yang kemudian menghasilkan suatu gagasan dan kesimpulan. Peneliti memahami penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan suatu penelitian yang fokus mendeskripsikan peristiwa yang terjadi secara sistematis, logis dan obyektif agar dapat menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Digitalisasi KTP melalui program Identitas Kependudukan Digital di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data penelitian yakni Data Primer dan Data Sekunder data primer (Arikunto, 2002) yang didapatkan dengan proses wawancara secara langsung dengan informan. Para informan ditentukan dengan teknik *teknik purposive sampling* dan *snowball sampling* menurut (Sugiyono, 2021) dengan maksud sumber data yang pada awalnya kecil atau sedikit lama kelamaan menjadi besar karena pada saat penelitian penulis diberikan saran untuk menambah beberapa informan yang dianggap mampu melengkapi informasi yang dibutuhkan. Data yang sudah diperoleh selanjutnya diolah dengan teknik analisis data menggunakan metode analisis berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Silalahi, 2012).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Digitalisasi KTP melalui Program Identitas Kependudukan Digital di Kota Samarinda

Peneliti membahas hasil penelitian pada Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Digitalisasi KTP melalui Program Identitas Kependudukan Digital di Kota Samarinda dengan menggunakan teori strategi menurut Wheelan dan Hunger yang dikenal dengan Manajemen Strategik dengan fokus terhadap 4 dimensi yaitu: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol.

a. Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan merupakan kegiatan memonitor, mengevaluasi, dan mencari informasi dari lingkungan internal dan eksternal sebuah organisasi yang bisa menjadi pertimbangan dalam perumusan strategis.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pada jaringan pusat menjadi kendala utama yang didapat dari lingkungan internal Disdukcapil Kota Samarinda yang dapat menghambat pelaksanaan aktivasi IKD.

Selanjutnya kendala eksternal menyangkut pemahaman masyarakat dan lembaga pengguna yang belum menerima IKD. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama PLT Kadis Disdukcapil Kota Samarinda menggambarkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap IKD masih sangat kurang, hal ini menyebabkan kurang tertariknya masyarakat untuk melaksanakan aktivasi IKD, ditambah belum adanya regulasi untuk mewajibkan masyarakat yang wajib KTP untuk mempunyai IKD membuat masyarakat kurang peduli terhadap IKD. Selanjutnya lembaga pengguna di Kota Samarinda belum ada yang menerima IKD sebagai sistem yang dapat mereka gunakan dalam pelaksanaan transaksi pelayanan publik, lembaga pengguna masih menggunakan sistem fisik dengan fotocopy dan masih susah menerima IKD, dan dengan belum adanya regulasi yang mengikat lembaga pengguna untuk wajib menggunakan IKD sebagai sistem transaksi publiknya menjadi salah satu alasan lembaga pengguna belum menerima IKD. Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat juga menjelaskan bahwa masyarakat belum paham dan mengerti tentang IKD, masyarakat baru mengetahui mengenai IKD ketika datang ke kantor Disdukcapil untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Dapat disimpulkan bahwa promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Samarinda masih belum merata dan masih bisa ditingkatkan lagi.

b. Formulasi Strategi

Wheelen dan Hunger dalam (Solihin, 2012:82), menjelaskan bahwa tahapan formulasi strategi pada organisasi dengan secara berkala mempelajari kembali visi dan misi serta tujuan organisasi guna merumuskan strategi yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda telah termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil obeservasi pada saat melakukan penelitian serta hasil dokumentasi berupa data Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tahun 2021-2026 yang menjadi visi dalam lima tahun kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yaitu, “Terwujudnya Lembaga yang Profesional dalam melayani Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil yang didukung oleh Partisipasi Masyarakat”.

Berdasarkan identifikasi dalam pengamatan lingkungan dalam kajian kendala dalam melakukan aktivasi IKD diatas, maka dapat dirumuskan strategi atau kebijakan yang perlu dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Samarinda, yaitu:

1. Strategi yang dirumuskan dengan memperhatikan faktor pendukung internal yang dimiliki untuk memanfaatkan faktor eksternal yang dimiliki, berupa:
 - a. Memaksimalkan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital diseluruh wilayah Kota Samarinda dengan menggunakan anggaran yang disediakan.
 - b. Memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tugas pokok, fungsi dan kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebagai dasar dalam kepengurusan aktivasi IKD.
2. Strategi yang dirumuskan dengan memperhatikan faktor pendukung internal yang dimiliki untuk menghindari faktor penghambat eksternal yang dimiliki, berupa:
 - a. Meningkatkan fungsi dan tugas dinas berdasarkan peraturan yang berlaku dengan membuat Tim Aktivasi IKD di wilayah kecamatan yang kurang dalam jumlah aktivasi IKD.
 - b. Memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan melaksanakan sosialisasi dan promosi diseluruh wilayah Kota Samarinda untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait IKD.
3. Strategi yang dirumuskan dengan memaksimalkan faktor pendukung eksternal yang dimiliki untuk mengatasi faktor penghambat eksternal yang dimiliki, berupa:
 - a. Menggunakan regulasi yang diberikan pemerintah guna mengajukan permohonan terkait ketersediaan perangkat untuk pelaksanaan aktivasi IKD.

- b. Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap pelaksanaan fungsi dan tugasnya terutama dalam memberikan pelayanan aktivasi kepada masyarakat lansia yang kurang tertarik dan kurang paham terkait IKD.
4. Strategi yang dirumuskan untuk meminimalkan faktor penghambat internal yang dimiliki dan faktor penghambat eksternal yang dimiliki, berupa:
 - a. Meningkatkan kegiatan promosi dan sosialisasi tentang IKD kepada masyarakat.
 - b. Mengatasi kurang aktifnya masyarakat untuk melaksanakan aktivasi IKD dengan mengajukan permohonan membuat regulasi yang mewajibkan masyarakat Kota Samarinda untuk memiliki IKD kepada Pemerintah Kota Samarinda.

c. Implementasi Strategi

Dimensi Implementasi Strategi menurut Wheelen dan Hunger dalam Solihin (2012:82) menjelaskan bahwa tujuan dan strategi organisasi yang dibuat akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila tujuan dan strategi tersebut dituangkan dalam bentuk program yang terjadwal dengan teratur serta mendapatkan alokasi sumber daya memadai yang dituangkan dalam bentuk anggaran yang akan mendukung setiap program.

Implementasi Strategi menurut Wheelen dan Hunger dibahas melalui 3 indikator yaitu :

a. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan guna memenuhi sasaran dan tujuan sesuai fungsi dan tugasnya. Dalam program terdapat kegiatan yang berguna untuk terlaksananya program tersebut. Kegiatan berisi kumpulan tindakan pengalokasian sumber daya yang ada sebagai input atau masukan untuk mendapatkan output atau keluaran dalam bentuk barang dan jasa serta modal.

Berdasarkan hasil dokumentasi dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tahun 2021-2026, peneliti memperhatikan bahwa adanya program dan kegiatan yang telah direncanakan disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada serta menangani isu strategis yang terjadi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Anggaran

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda mempunyai anggaran yang mencukupi dalam melakukan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam hal ini mengenai pelaksanaan aktivasi IKD yang dapat dikhususkan anggarannya dengan membuat sebuah Tim Aktivasi IKD.

c. Prosedur

untuk mendapatkan pelayanan aktivasi IKD dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda harus dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sudah melakukan perekaman KTP
- 2) Memiliki Handphone Android ataupun IOS
- 3) Memiliki Email

Layanan aktivasi IKD dapat diperoleh dengan mengikuti panduan pendaftaran aktivasi IKD dengan langkah berikut:

- 1) Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Google Play Store ataupun Appstore
- 2) Buka aplikasi dan lakukan pengisian data diri berupa NIK, Email, dan No. HP kemudian klik Verifikasi Data
- 3) Pilih tombol ambil foto untuk verifikasi wajah dan lakukan pengambilan foto

- 4) Pilih scan QR Code dan lakukan scan QR Code pada operator IKD Disdukcapil Kota Samarinda dan Kecamatan
- 5) Lakukan aktivasi dengan cara mengakses link yang dikirimkan melalui Email yang sudah didaftarkan
- 6) Setelah status aktif, buka kembali aplikasi IKD dan masukkan kode aktivasi yang telah diperoleh di email
- 7) Aplikasi Identitas Kependudukan Digital siap digunakan, jangan lupa untuk mengganti PIN agar mudah diingat.

d. Evaluasi dan Kontrol

Evaluasi dan kontrol sejatinya adalah kegiatan membandingkan kinerja aktual yang dicapai organisasi dengan standar kinerja. Kemudian akan dilakukan evaluasi apabila terjadi kesenjangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi kependudukan khususnya dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Kontrol yang dilakukan oleh Disdukcapil terhadap pelaksanaan aktivasi IKD adalah dengan terus melaporkan situasi dan kondisi dan perkembangan aktivasi IKD setiap harinya, baik oleh operator aktivasi IKD yang ada di Kantor Disdukcapil atau oleh perwakilan Disdukcapil di tiap Kantor Kecamatan di Kota Samarinda. Untuk evaluasi dilaksanakan satu bulan sekali dalam rapat evaluasi yang membahas kendala yang terjadi dilapangan dan pembagaian tugas pelaksanaan aktivasi IKD ke lapangan.

3.2. Kendala Dalam Melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Samarinda belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan aktivasi IKD masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yakni: pertama, masih sering terjadinya gangguan pada jaringan pusat yang menghambat proses aktivasi IKD. Kedua, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap IKD. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi KTP melalui program IKD. Keempat, lembaga pengguna yang belum menerima IKD sebagai sistem transaksi pelayanan publik.

3.3. Upaya dalam mengatasi kendala yang terkait dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Samarinda

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital yaitu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, membuat Tim Aktivasi IKD, membuka stand aktivasi IKD, membuat ketentuan khusus kepada masyarakat dan menempatkan perwakilan Disdukcapil di setiap kecamatan yang ada di Kota Samarinda.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti meninjau Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Digitalisasi KTP melalui Program Identitas Kependudukan Digital di Kota Samarinda dengan penelitian sebelumnya oleh (Widiyarta & Humaidah, 2023). Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh

Widiyarta dan Humaidah yaitu menyatakan bahwa Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah dilaksanakan sesuai dengan arahan, arahan yang dimaksud adalah arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan aktivasi IKD yang dimuat dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022. Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang peneliti lakukan yang menyimpulkan bahwa IKD telah terselenggara di Kota Samarinda dengan dasar hukum Permendagri No. 72 Tahun 2022. peneliti meninjau kendala dalam melakukan aktivasi dengan penelitian sebelumnya dengan judul Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya oleh Widiyarta dan Humaidah pada tahun 2023. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa masih ada masalah yang terjadi dalam pengimplementasian aktivasi Identitas Kependudukan Digital seperti smartphone belum support, tidak mempunyai smartphone, antusias kurang, dan perangkat yang masih lemot. Hal diatas sesuai dengan hasil tinjauan kendala dalam melakukan aktivasi IKD, dalam hal antusiasme dan juga pemahaman masyarakat terhadap IKD di Kota Samarinda yang masih kurang. Pada penelitian yang dilakukan penulis sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiyarta & Humaidah, 2023), (Permadi & Rokhman, 2023), dan (Alfarizi, 2023) hanya saja terdapat beberapa perbedaan. Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Bella & Widodo, 2024), penelitian tersebut disertai dengan Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan lokus pada tingkat Kecamatan Tambaksari. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah & Anisykurlillah, 2023), penelitian disertai efektivitas program pelayanan identitas kependudukan digital dengan lokus Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. Sedangkan pada penelitian (Yulanda & Frinaldi, 2023), penelitian tersebut dilakukan pada tingkat nasional. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Safitri, 2023), penelitian dilakukan dengan teori partisipasi dengan lokus Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Selanjutnya pada penelitian oleh (Anryana et al., 2024) dianalisis dengan teori Penerapan dengan lokus Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan pada penelitian (Nurdiana & Ayumi, 2024) dan (Aprilia & Wahyudi, 2023) penelitian dianalisis dengan teori implementasi dengan lokus masing-masing Kota Tanjungpinang dan Kelurahan Kalirungkut Surabaya. Pada penelitian yang dilakukan peneliti juga disertai dengan analisis terhadap faktor penghambat dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan aktivasi IKD di Kota Samarinda.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Digitalisasi KTP melalui Program Identitas Kependudukan Digital yang diuraikan dengan menggunakan Teori Strategi menurut Wheelen dan hunger dalam (Solihin, 2012:164) yang terdiri dari 4 dimensi yaitu Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, dan Implementasi Strategi serta Evaluasi dan Kontrol sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat cukup banyak evaluasi yang dapat dilakukan kedepannya seperti masih sering terjadinya gangguan pada jaringan pusat yang menghambat proses aktivasi IKD, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap IKD, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi KTP melalui program IKD dan lembaga pengguna yang belum menerima IKD sebagai sistem transaksi pelayanan publik. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital yaitu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, membuat Tim Aktivasi IKD, membuka stand aktivasi IKD, membuat ketentuan khusus kepada masyarakat dan menempatkan perwakilan Disdukcapil di setiap kecamatan yang ada di Kota Samarinda.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada kemampuan penulis dan kesempatan waktu dalam penelitian. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis menyebabkan penelitian ini hanya menyajikan data dari hasil analisis dan pembahasan atas aktivasi IKD di Kota Samarinda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan secara detail pada lokasi serupa terkait dengan aktivasi IKD di Kota Samarinda.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Samarinda terkhusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. (2023). Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 41–54.
- Anryana, S., Yamin, A., & Fietroh, M. N. (2024). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 188–193.
- Aprilia, R. R. V., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 645–650.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka cipta.
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31.
- Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 510–517.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50–58.
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88.
- Safitri, D. V. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(2), 59–65.
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soelihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43–51.
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2), 414–424.